

# WARTA PEMERIKSA



## BPK Pimpin Panel Eksternal Auditor PBB

PANEL JUGA MEMBAHAS  
PENGELOLAAN PENDANAAN  
PERUBAHAN IKLIM DAN  
TRANSFORMASI DIGITAL DI PBB.



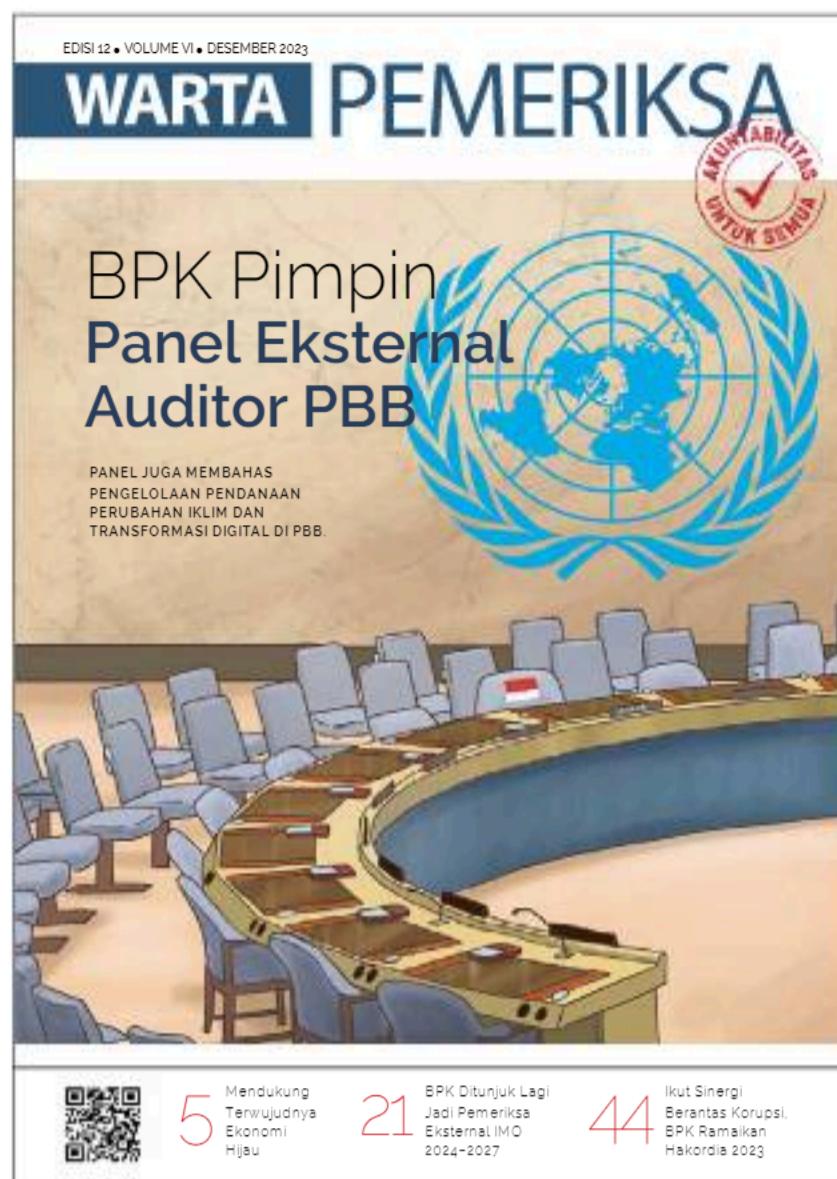
5 Mendukung  
Terwujudnya  
Ekonomi  
Hijau

21

BPK Ditunjuk Lagi  
Jadi Pemeriksa  
Eksternal IMO  
2024–2027

44

Ikut Sinergi  
Berantas Korupsi,  
BPK Ramaikan  
Hakordia 2023

**PENGARAH**

Isma Yatun  
Hendra Susanto  
Nyoman Adhi Suryadnyana  
Daniel Lumban Tobing  
Haerul Saleh  
Ahmadi Noor Supit  
Pius Lustrilanang  
Slamet Edy Purnomo

**PENANGGUNG JAWAB**

Bahtiar Arif

**WAKIL PENANGGUNG JAWAB**

R. Yudi Ramdan Budiman

**KETUA TIM REDAKSI**

Sri Haryati

**KEPALA SEKRETARIAT**

Bestantia Indraswati

**SEKRETARIAT**

Fitri Yuliantri Permana  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Apriyana  
Sudarman

**ALAMAT SEKRETARIAT**

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id  
www.bpk.go.id

**DITERBITKAN OLEH**

Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang  
meminta/menerima uang/  
barang/fasilitas lainnya  
daripihak yang terkait dengan  
pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018  
tentang Kode Etik BPK)

**P**ada edisi Desember 2023 ini, *Warta Pemeriksa* berbicara tentang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pertemuan dalam kapasitas sebagai Ketua Panel Eksternal Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dilaksanakan pada November 2023 lalu.

Kepada Sekjen PBB, Isma menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik, periode pasca-Covid-19, serta tekanan inflasi dan mata rantai global. Hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas. Untuk itu, panel mengharapkan adanya strategi pendanaan yang terstruktur dengan baik. Panel juga membahas pengelolaan pendanaan perubahan iklim dan transformasi digital di PBB.

Bahasan lain yaitu mengenai ekonomi hijau. Khususnya terkait komitmen BPK untuk mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan penyelenggaraan International Training mengenai Audit SDGs dengan fokus Transisi Energi sebagai bagian Green Economy di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Bali dari 27 November sampai 1 Desember 2023.

Simak juga informasi mengenai BPK yang terpilih menjadi pemeriksa eksternal Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2023-2025. IPU adalah organisasi internasional yang membawahi parlemen-parlemen di negara anggota. Selain itu, BPK juga dipercaya kembali menjadi pemeriksa eksternal untuk International Maritime Organization (IMO) untuk periode 2024-2027.

Jangan lewatkan pesan Ketua BPK Isma Yatun bahwa tiap perempuan memiliki kisah hebatnya secara masing-masing dan diharapkan terus menjadi inspirasi bagi orang di sekelilingnya. Hal ini, menurut dia, karena perempuan menjalankan seluruh perannya dengan penuh tanggung jawab sehingga mampu mewujudkan keluarga yang bahagia, masyarakat yang kokoh dan juga rakyat yang kuat.

Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan dalam edisi penutup tahun 2023 ini. Selamat menikmati. ~



#### 4 » Memimpin Panel Eksternal Auditor PBB, Menjaga Pentingnya Pengelolaan Risiko

Panel juga membahas pengelolaan pendanaan perubahan iklim dan transformasi digital di PBB.



#### 5 » Mendukung Terwujudnya Ekonomi Hijau

Seluruh proses pelatihan pun digelar secara *paperless*.



#### 8 » Digitalisasi Birokrasi untuk Pemberantasan Korupsi

Terkait digitalisasi birokrasi, Gunarwanto menyampaikan, hal itu sudah lama dilaksanakan BPK.

- 10 »** Membangun *Digital by Default*
- 13 »** Mendukung Keterjangkauan Energi Listrik untuk Masyarakat
- 16 »** Penggunaan *Sampling* dalam Pemeriksaan Kinerja
- 20 »** BPK Jadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Parlemen Dunia
- 21 »** BPK Ditunjuk Lagi Jadi Pemeriksa Eksternal IMO 2024–2027
- 23 »** BPK: Hasil Pemeriksaan IMO Tahun 2021 dan 2022 Telah Disajikan Secara Wajar
- 24 »** ANAO Diharapkan Dapat Terus Tingkatkan Kapasitas BPK
- 26 »** *Fraud* dan Cara Mendeteksi Korupsi dari Perspektif Auditor
- 28 »** Bertukar Pikiran dan Pengalaman dalam Mencapai Transisi Energi
- 31 »** Agar Anak Tumbuh Jadi Pribadi Positif
- 34 »** Ketua BPK: Perempuan Jangan Berhenti Menginspirasi
- 35 »** Perempuan Berperan dalam Pencegahan Korupsi
- 37 »** Mengoptimalkan Dampak Audit untuk Mendorong Transformasi Ekonomi Inklusif dan BerkelaJutan
- 39 »** Ketua BPK: Perencanaan Strategis adalah Sebuah Perjalanan Bersama
- 41 »** Rakor untuk Hadapi *Dispute* dan *Cut Loss*
- 42 »** Ketua BPK: Itama Pilar Krusial dalam Proses *Recovery*
- 44 »** Ikut Sinergi Berantas Korupsi, BPK Ramaikan Hakordia 2023
- 47 »** Waspada Potensi *Fraud* pada Projek COP28
- 50 »** Menyambut Kedatangan Rupiah Digital: Belajar dari China, India dan Nigeria
- 56 »** Berita Foto

# Memimpin Panel Eksternal Auditor PBB, Menjaga Pentingnya Pengelolaan Risiko

PANEL JUGA MEMBAHAS PENGELOLAAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DAN TRANSFORMASI DIGITAL DI PBB.



■ Ketua BPK, Isma Yatun (tengah) didampingi Sekjen BPK Bahtiar Arif (kanan).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dalam kapasitas sebagai Ketua Panel Eksternal Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Hal itu dilaksanakan pada November 2023 lalu. Ketua BPK didampingi oleh 11 anggota panel dari 11 negara yaitu Kanada, Chile, Cina, Perancis, Jerman, India, Italia, Filipina, Russia, Swiss, dan Inggris.

Kepada Sekjen PBB, Isma menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik, periode pasca Covid-19 serta tekanan inflasi dan mata rantai global. Hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas. Untuk itu, panel mengharapkan adanya strategi pendanaan yang terstruktur dengan baik. Panel juga membahas pengelolaan pendanaan perubahan iklim dan transformasi digital di PBB.

Antonio Guterres pun menghargai peran auditor dalam mengawal pengelolaan keuangan dan kinerja PBB. Sekjen PBB menjelaskan bahwa permasalahan pendanaan dan likuiditasnya adalah masalah yang penting dan kompleks. PBB akan selalu berupaya memperbaiki kinerja dengan terus mengembangkan berbagai skenario untuk memastikan keberlanjutan pendanaan ke depannya.

BPK menjadi anggota Panel Eksternal Auditor PBB sejak tahun 2016. BPK menjadi Wakil Ketua UN Panel pada tahun 2022, dan menjadi Ketua UN Panel pada tahun 2023. Panel Eksternal Auditor PBB adalah forum untuk pertukaran informasi dan metodologi untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai dan kualitas proses jaminan pemeriksaan eksternal pada organisasi-organisasi PBB.

Panel beranggotakan pimpinan dari 12 Supreme Audit Institutions (SAIs) yang ditunjuk maupun dipilih untuk melaksanakan audit eksternal pada PBB, Badan Khusus PBB, dan Badan Atom Dunia (IAEA) UN Secretariat, Funds and Programmes and Specialized Agencies, dan International Atomic Energy Agency. ~



■ Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto

# Mendukung Terwujudnya **Ekonomi Hijau**

SELURUH PROSES PELATIHAN PUN DIGELAR SECARA PAPERLESS.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen untuk mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Komitmen BPK tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan *International Training* mengenai Audit SDGs dengan fokus Transisi Energi sebagai bagian *Green Economy* di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Bali dari 27 November sampai 1 Desember 2023.

Dalam pembukaan pelatihan internasional tersebut pada Senin (27/11), Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto, menekankan bahwa ekonomi hijau merupakan aspek penting dalam kerangka SDGs yang lebih luas. Menurutnya, pertumbuhannya didorong oleh investasi publik dan swasta dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan kerugian keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Pergeseran paradigma menuju ekonomi hijau yang memerlukan peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan tenaga air dinilai sangat penting untuk pelestarian lingkungan, kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, memberikan keamanan energi, dan menjamin masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang.



"SAI memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi hijau dengan memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan efektif dalam inisiatif pembangunan lingkungan dan berkelanjutan," kata Hendra menjelaskan.

Hendra memaparkan peran tersebut di hadapan 28 peserta yang berasal dari 12 negara antara lain Brasil, China, India, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi. Para peserta merupakan auditor di SAI negara masing-masing. BPK menyelenggarakan pelatihan ini sebagai platform peningkatan kapasitas, membantu komunitas SAI meningkatkan kemampuan audit dalam konteks transisi energi, dengan harapan dapat berkontribusi dalam membangun komunitas auditor yang lebih kuat.

Penyelenggaraan pelatihan internasional ini menunjukkan BPK memegang peranan penting sebagai *role model* dalam pemeriksaan transisi energi. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK



tentang audit lingkungan, energi terbarukan, dan perubahan iklim menjadi bahan rujukan dan masukan bagi dunia internasional melalui SAI negara lain.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemeriksaan Keuangan Negara Suwarni Dyah Setyaningsih menyampaikan, pencapaian SDGs membutuhkan upaya bersama salah satunya dengan penguatan kapasitas dan berbagi pengalaman. Badan Diklat pun telah mendesain pelatihan tersebut untuk meningkatkan pemahaman sekaligus menjembatani diskusi antarnegara terkait implementasi SDGs.

Badan Diklat juga berkomitmen mengimplementasikan SDGs dengan memperhatikan 5P yakni *people, planet, prosperity, peace, and partnership*. Sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan ekonomi hijau itu, seluruh proses pelatihan pun digelar secara *paperless* dengan memanfaatkan *learning management system*.

"Seluruh peserta dapat mempelajari dan mengakses *e-learning*, sehingga mereka dapat belajar kapanpun, dimanapun, dengan alat apapun," ujarnya. ~





[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



@bpkriofficial



BPK RI Official



@bpkri



@humasbpkri.official



08111907010



@bpk.ri

- ▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

# Digitalisasi Birokrasi untuk Pemberantasan Korupsi

TERKAIT DIGITALISASI BIROKRASI, GUNARWANTO MENYAMPAIKAN,  
HAL ITU SUDAH LAMA DILAKSANAKAN BPK.

B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang bertindak sebagai pemeriksa eksternal pemerintah, terus berupaya menjadi instansi terdepan untuk memberantas perilaku korupsi. Hal itu pun turut dilakukan dari lingkungan internal BPK. Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK, Gunarwanto menyampaikan, digitalisasi menjadi salah satu upaya mendesak untuk mendukung pemberantasan korupsi tersebut.

"Saat ini, digitalisasi birokrasi merupakan suatu keharusan dan sangat mendesak untuk dilaksanakan," ungkap Gunarwanto kepada *Warta Pemeriksa*.

Gunarwanto menjelaskan, BPK melalui Digital Enterprise Architecture (DNA) berupaya memetakan dan membuat peta jalan digitalisasi proses bisnis birokrasi BPK. Dalam bidang pemeriksaan, berbagai aplikasi telah dikembangkan, seperti SIAP LK, SMP, SIPTL, dan lain-lain. Dalam bidang kelembagaan, manajemen SDM telah dibantu dengan SISDM, manajemen aset telah dibantu dengan SIMAK BMN, manajemen persuratan telah dibantu oleh JASMIN, begitu pula manajemen perbendaharaan telah dibantu dengan SINTAG.



■ Gunarwanto



**Upaya-upaya tersebut telah berhasil dengan baik dan semakin berkembang. Saat ini, hampir semua layanan ke-BPK-an telah menggunakan platform digital. Bahkan layanan kepada masyarakat luas juga mulai diberikan secara elektronis.**

"Aplikasi-aplikasi tersebut, selain bertujuan mempercepat proses bisnis juga dapat digunakan sebagai alat kontrol dan monitoring perilaku pemeriksa dan hasil pekerjaannya," ujar Gunarwanto.

Gunarwanto mencontohkan, SIAP LK digunakan oleh Tim Pemeriksa untuk mendokumentasikan proses pemeriksaan di lapangan, mulai dari pelaksanaan atas program pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan kertas kerja pemeriksaan. Data-data tersebut dapat digunakan oleh para pereviu untuk memonitor performa Tim Pemeriksaan, baik dari sisi *audit coverage, initial findings, key area, and progress report* dari minggu ke minggu.

"Setiap ketidakwajaran proses dan data dapat menjadi *red flag* terjadinya ketidakwajaran peroses pemeriksaan," ungkapnya.

Terkait digitalisasi birokrasi, Gunarwanto menyampaikan, hal itu sudah lama dilaksanakan BPK. Menurutnya, pada medio 2007-2009, BPK telah memperkenalkan SISKA dan Pusat Informasi Pegawai (PIP) sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan. Di Biro SDM, manajemen SDM elektronis sudah dimulai sejak 2009 dengan pengembangan SISDM Dekstop yang kemudian diikuti dengan SISDM berbasis Web pada 2013. Pada tahun-tahun tersebut, sistem presensi dan cuti pegawai juga mulai dialihkan dari manual ke elektronik.

"Upaya-upaya tersebut telah berhasil dengan baik dan semakin berkembang. Saat ini, hampir semua layanan ke-BPK-an telah menggunakan *platform* digital. Bahkan layanan kepada masyarakat luas juga mulai diberikan secara elektronis," kata Gunarwanto.

Dengan pengalaman panjang dalam digitalisasi tersebut, Gunarwanto menilai terdapat sejumlah hambatan dan tantangan. Hal itu seperti hambatan terkait budaya kerja. Dia menjelaskan, tidak mudah mengubah kebiasaan pegawai yang telah terbiasa dan nyaman dengan model tradisional ke digital.

Selain itu, digitalisasi membutuhkan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang sangat besar. Ketiga komponen tersebut harus tersedia secara berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan digitalisasi.

Kemudian, terdapat tantangan dari sisi *tone of the top*. Menurut Gunarwanto, digitalisasi birokrasi tidak akan berhasil jika pimpinan tidak mendukung dan memberikan contoh. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh dukungan dari pimpinan menjadi sangat penting.

Selain itu, mengenai kerahasiaan data, BPK sebagai lembaga pemeriksa banyak memegang rahasia negara. Upaya menjaga kerahasiaan tersebut sangat penting, termasuk kerahasiaan data pribadi pegawai.

Persoalan perlindungan data juga menjadi sorotan. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi birokrasi juga menyimpan tantangan yang sangat besar, yaitu *hacking*.

"Beberapa kali BPK telah mengalami serangan siber dari pihak tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Gunarwanto menyampaikan, teknologi juga terus berkembang dengan cepat dan harus mampu diadaptasi oleh BPK. Upaya pemilihan teknologi yang *going concern* dan memiliki reliabilitas tinggi juga bukan sesuatu yang mudah.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, BPK telah mengembangkan DNA untuk memetakan kebutuhan digitalisasi birokrasi dan membuat peta jalan digitalisasi. "Hal ini penting untuk mengalokasikan sumber daya, mengubah budaya kerja, dan yang terpenting memperoleh dukungan dari para *stakeholder*," ujarnya.

Perlindungan data dengan bekerja sama dengan pihak yang kompeten dan berwenang di bidangnya, yaitu BSSN juga sangat krusial. Upaya uji kerentanan secara berkala harus terus dilaksanakan oleh BPK dan BSSN.

Gunarwanto menilai, ke depannya BPK perlu mendorong adanya kesatuan pandangan dari seluruh *stakeholder* terutama para pengambil kebijakan. Kemudian, internalisasi nilai integritas, independensi, dan profesionalisme perlu dilakukan kepada seluruh unit kerja dan pegawai secara berkesinambungan.

Internalisasi Kode Etik Pemeriksa perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai pengingat dan penguat, begitu pula dengan penguatan sistem pengawasan dalam praktik kerja pemeriksaan dan nonpemeriksaan. Perlu juga ada pemberian sanksi hukuman disiplin dan etik yang membuat jera, baik kepada pelaku korupsi di BPK dan pegawai secara umum.

"Saya berharap BPK sebagai lembaga pemeriksa mampu menjadi yang terdepan dalam menegakkan nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme yang pada gilirannya dapat meminimalisasi korupsi," ujarnya. ~



“



"Dengan berbagai aplikasi yang dimiliki, siklus *end-to-end* pemeriksaan kita sudah terintegrasi sejak proses perencanaan, pelaksanaannya, sampai dengan penyusunan IHPS, termasuk komunikasi dengan entitas dan stakeholder. Nah ini yang namanya nanti menjadi satu ekosistem, *digital audit ecosystem*, nah ini sudah mulai kita capai sekarang," paparnya.

Sehingga saat ini, kata Pranoto, BPK sudah berhasil membangun *digital audit ecosystem*, yang menjadi perkembangan reformasi birokrasi di BPK, terutama untuk sasaran tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. "Khususnya yang menjadi core bisnis BPK yaitu pemeriksaan. Saat ini di setiap tahapan pelaksanaan tugas melakukan kewenangan pemeriksaan, itu telah didukung dengan teknologi informasi BPK."

Kendati demikian, ia mengakui pemanfaatan dari aplikasi masih harus terus ditingkatkan. Secara nasional pada Tahun 2023, sudah ada 2.013 tim yang menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SIAP), yang mana dari tahun ke tahun pemakaiannya semakin meningkat.

Ia mengatakan, Seluruh satuan kerja juga terus bekerja sama untuk mengelola perubahan agar transformasi digital yang pada dasarnya juga transformasi organisasi dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, ia pun bekerja sama dengan Badiklat, AKN, Ditama Renvaja, Ditama Binbangkum, Itama dan Biro Humas untuk terus mengembangkan teknologi dan menyosialisasikan perkembangan teknologi yang sudah dibangun.



**Komitmen BPK juga bagus, di beberapa forum juga selalu diingatkan, menggunakan SIAP, menggunakan Big Data Analytics, sudah selalu diingatkan pada workshop, berbagai diklat, serta sosialisasi-sosialisasi yang telah dilaksanakan.**

"Awalnya orang mungkin merasa kurang nyaman, tapi nyatanya trennya naik. Komitmen BPK juga bagus, di beberapa forum juga selalu diingatkan, menggunakan SIAP, menggunakan Big Data Analytics, sudah selalu diingatkan pada workshop, berbagai diklat, serta sosialisasi-sosialisasi yang telah dilaksanakan," tutur dia.

Ia pun tidak lupa mengingatkan bahwa transformasi digital dalam reformasi birokrasi ternyata juga mendukung penerapan nilai-nilai dasar BPK. Sistem Informasi Pemeriksaan yang terintegrasi mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan secara akuntabel, transparan dan profesional. Selain itu, Itama dhi. Inspektorat Penegakan Integritas menginisiasi pengembangan beberapa aplikasi untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK diantaranya aplikasi *Whistle Blowing System* untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPK yang dapat diakses melalui <https://wbs.bpk.go.id/>, dan aplikasi pelaporan penerimaan gratifikasi yang dapat diakses melalui <https://ppg.bpk.go.id/>. Perkembangan BPK Big Data Analytics (BIDICS) dan akumulasi data digital proses bisnis BPK juga dapat digunakan untuk pengembangan profil risiko. Dengan demikian, melalui perkembangan teknologi, diharapkan independensi, integritas dan profesionalisme BPK dapat dijaga.

"Jadi diharapkan aktivitas keseharian proses bisnis BPK dilaksanakan melalui teknologi informasi yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi bukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi menjadi hal yang biasa saja. Itulah yang kita sebut namanya *digital by default*, bukan hanya proses bisnis internal akan tetapi juga interaksi dengan entitas dan stakeholder. Itulah yang kita harapkan terbangun *digital audit ecosystem*," tutur dia. ~



Selain itu, pemerintah juga menyusun *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) serta *Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050.

BPK menyimpulkan, terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya pemerintah dalam pengelolaan energi primer untuk ketenagalistrikan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi.

Permasalahan itu yakni mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju *net zero emision* (NZE) tahun 2060 belum sepenuhnya dilakukan. Kebijakan pemerintah untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) 23 persen akan meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan sebesar 118,15 persen. Ini sangat berpengaruh terhadap besaran subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung oleh Pemerintah. Selain itu, terdapat permasalahan lain terkait dengan mitigasi risiko atas dukungan pendanaan dan kebijakan pengembangan energi terbarukan tenaga surya.

Akibatnya, muncul risiko tidak diperolehnya harga tenaga listrik yang ekonomis dan menurunnya daya saing industri dalam negeri yang menggunakan tenaga listrik.

BPK pun merekomendasikan Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan semua kementerian terkait dalam mengembangkan dan mendetailkan *road map* sektor ESDM dengan memperhatikan hubungan antarsektor, identifikasi risiko berikut rencana mitigasinya, dan melakukan analisis atas dampak dari pilihan yang ditetapkan.

Permasalahan selanjutnya yakni rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) berpotensi mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional. Perhitungan kemajuan proyek pembangunan pembangkit saat ini dan proyeksi kesiapan operasi unit pembangkit, menunjukkan bahwa mayoritas sistem tenaga listrik berada dalam kondisi siaga dan defisit. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan rendahnya realisasi RUPTL.

Data historis pemenuhan target RUPTL dari tahun 2011 sampai Agustus 2022 menunjukkan bahwa rata-rata persentase capaian hanya sebesar 46,13 persen. Selain itu terdapat kendala progres penyelesaian atas 15 proyek dengan kapasitas 336,8 Megawatt (MW) yang progres konstruksinya berhenti serta 12 proyek

dengan kapasitas 177 MW diterminasi atau tidak dilanjutkan. Hal ini mengakibatkan, timbul potensi kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.

BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memastikan PT PLN (Persero) melaksanakan rekomendasi langkah-langkah percepatan realisasi proyek RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2021-2030 yang disampaikan oleh Kementerian ESDM.

Kemudian, terdapat permasalahan perhitungan gas rumah kaca (GRK) sektor energi subsektor ketenagalistrikan belum menggambarkan jumlah emisi riil yang dihasilkan pembangkit listrik dan target dalam Enhanced NDC belum mempertimbangkan realisasi aksi mitigasi pengurangan emisi GRK sektor energi.

Perhitungan emisi GRK masih menggunakan data sekunder berupa data penjualan batu bara, sementara data primer emisi yang dipantau langsung menggunakan aplikasi APPLE-Gatrik tidak digunakan dalam perhitungan emisi GRK. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan emisi GRK pada tahun 2018 sampai 2020 yang mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode penghitungan Tier 3 (menggunakan aplikasi APPLE-Gatrik) hasil perhitungan emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik lebih kecil daripada jumlah emisi yang dihitung dan dilaporkan oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian LHK.

Akibatnya, hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK sektor energi subsektor ketenagalistrikan yang dipublikasikan lebih besar dan tidak menggambarkan jumlah emisi GRK yang sebenarnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri ESDM dan Menteri LHK sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain menginisiasi proses konsolidasi data antara Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) dengan Pusdatin ESDM sehingga data APPLE-Gatrik menjadi dasar perhitungan inventarisasi GRK subsektor ketenagalistrikan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan batubara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi mengungkapkan 16 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan. ~

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif  
dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023  
pada kategori Lembaga Negara  
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



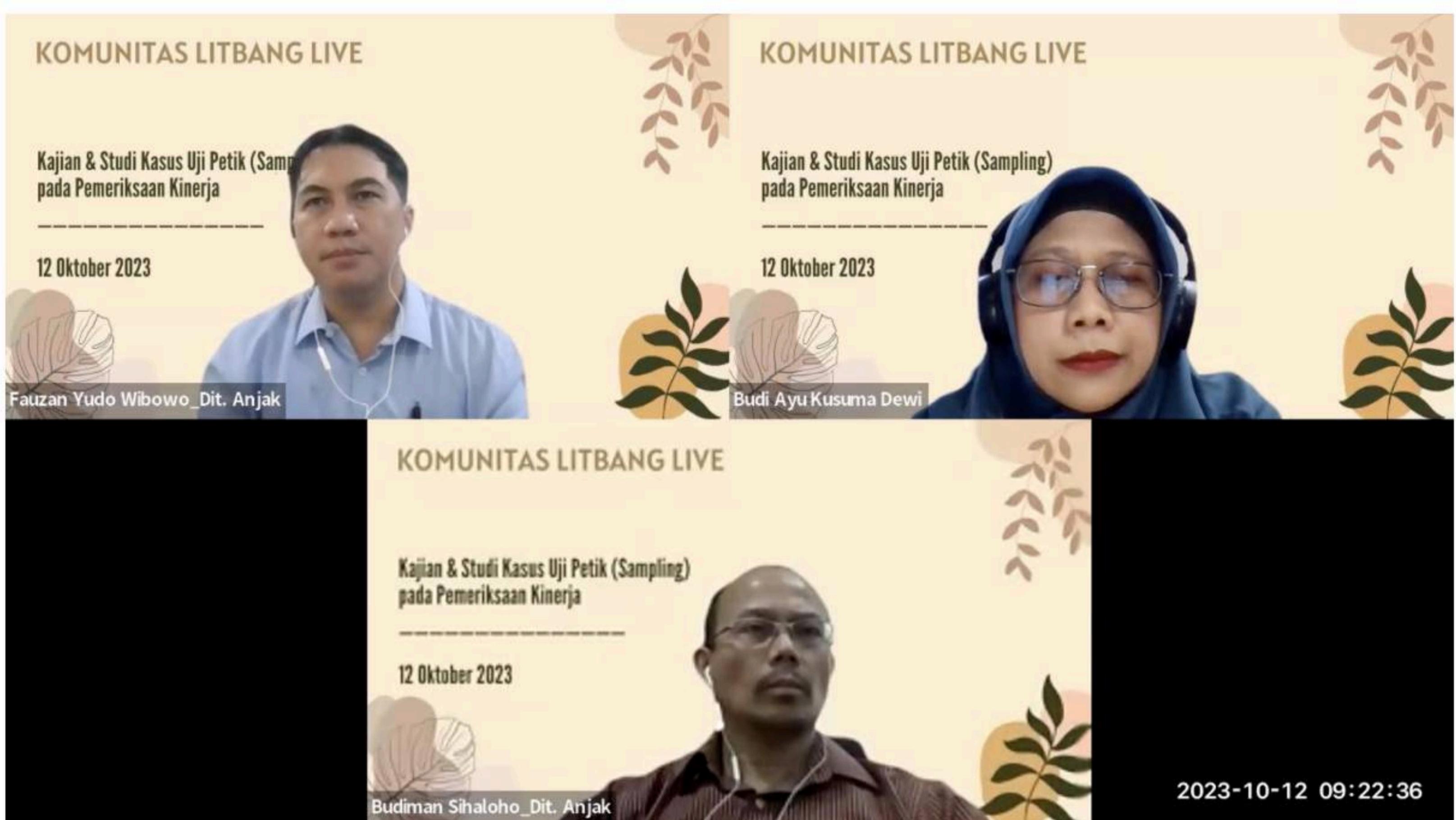
BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

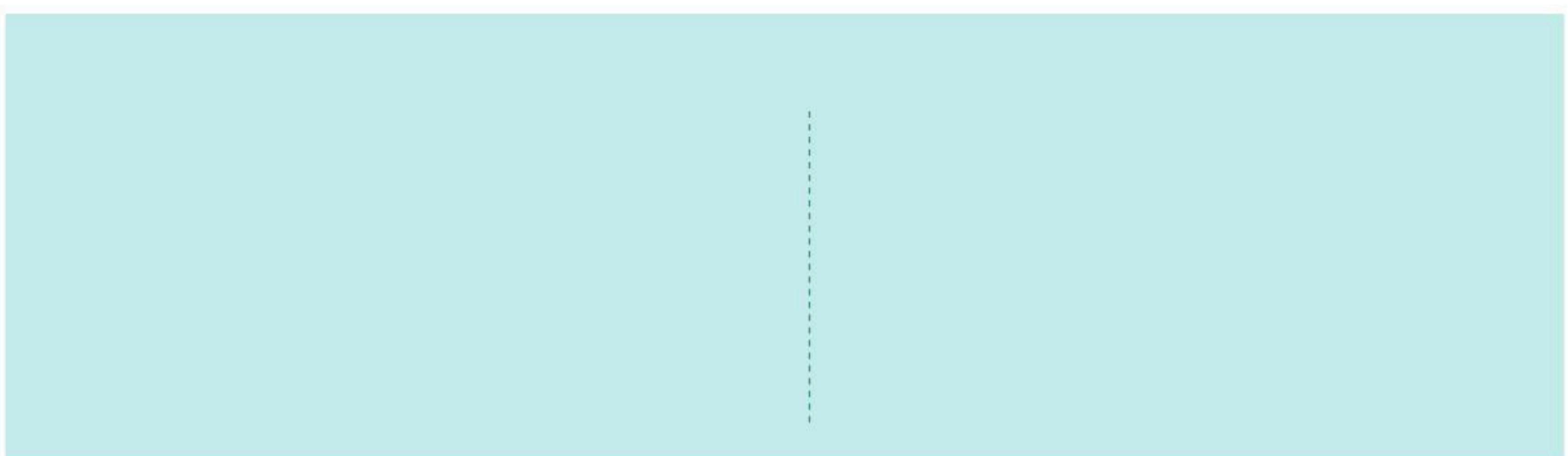




---



-----



-----





















































































